

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5
2.2 Kebijakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	6
2.3 Tata Kelola.....	16
2.4 Prinsip dan Struktur Penilaian “ <i>Good Governance</i> ”	21
2.4.1 International Development Association (IDA).....	21
2.4.2 African Development Bank (AfDB).....	24
2.4.3 United Nations Development Programme (UNDP)	25
2.4.4 Asian Development Bank (AsDB)	26
2.4.5 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ...	28
2.5 Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Penelitian.....	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	35

3.3	Sampel Penelitian.....	36
3.4	Pengumpulan Data	37
3.5	Analisis Data	39
3.6	Definisi Operasional.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Tata Kelola	44
4.1.1	Tata Kelola Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja	44
4.1.2	Tata Kelola Perizinan Berusaha Pemanfaatan Setelah Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja	51
4.2	Realisasi Tata Kelola Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Setelah Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja	58
4.2.1	Akuntabilitas	58
4.2.2	Partisipasi.....	75
4.2.3	Rule Of Law.....	82
4.2.4	Transparansi.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		100
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN.....		109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan pada Pasal 26 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	10
Tabel 2. Daftar informan dalam penelitian ini	37
Tabel 3. Perbandingan Elemen Operasional Good Governance	40
Tabel 4. Indikator Penilaian Good Governance	43
Tabel 5. Regulasi terkait tata kelola izin usaha pemanfaatan hutan sebelum UUCK	45
Tabel 6. Data dan Informasi terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) sebelum UUCK	46
Tabel 7. Penerapan prinsip tata kelola yang baik IUPH sebelum UUCK	48
Tabel 8. Data dan Informasi terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah UUCK	53
Tabel 9. Perbedaan kebijakan IUPH dengan PBPH	56
Tabel 10. Data dan Hasil penelitian terhadap prinsip Akuntabilitas	59
Tabel 11. Perbandingan tata waktu antara regulasi dengan realisasi dilapangan pada tahapan pengajuan PBPH	66
Tabel 12. Data dan Hasil penelitian terhadap prinsip Partisipasi	76
Tabel 13. Data dan Hasil penelitian terhadap prinsip Rule of Law	83
Tabel 14. Data dan Hasil penelitian terhadap prinsip Transparansi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pengajuan PBPH Berdasarkan PERMENLHK No. 8/2021.....	12
Gambar 2. Pilar dan Prinsip Pranata dan Tata Kelola Kehutanan	29
Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian	33
Gambar 4. Triangulasi metode.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Verifikasi Persyaratan Teknik dan Persyaratan Komitmen	110
Lampiran 2. SOP Pengecekan dan Penilaian Dokumen Penyelesaian Komitmen	112
Lampiran 3. SOP Penyiapan Persetujuan Sertifikat Standar atau Surat Keputusan Tentang Pemberian PBPH.....	114
Lampiran 4. Interview Guide Instansi Pemerintah	116
Lampiran 5. Interview guide pelaku usaha	120